

## Pengaruh Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh:

Rosdiana Matoneng, [matonengrosdiana99@gmail.com](mailto:matonengrosdiana99@gmail.com)

Olivia Lalamentik, [olivialalamentik@unima.ac.id](mailto:olivialalamentik@unima.ac.id)

M.Si, Stanny Rawung, MM, [stannyrawung@unima.ac.id](mailto:stannyrawung@unima.ac.id)

Afiliasi: Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

---

**ABSTRAK** Penelitian ini guna bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan tabel koefisien dapat dilihat nilai signifikan  $0,060 > 0,05$  dengan demikian tidak terdapat pengaruh yang signifikan anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel Model Summary di atas dapat dilihat  $r^2 = 0,106 \times 100 = 10,6\%$  dengan demikian pengaruh anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 10,6%. Dari hasil analisis ini maka hipotesis Terdapat Pengaruh signifikan anggaran belanja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh deviani (2016) yang memberikan penjelasan bahwa belanja daerah berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** Alokasi Anggaran Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi

**ABSTRACT** This study aims to determine the effect of development budget allocation on Indonesia's economic growth. The research method in this study is the correlational method. Based on the results of the study, based on the coefficient table, it can be seen that the significant value of  $0.060 > 0.05$  with the result there is no significant influence of development spending on economic growth. Based on the Model Summary table, it can be seen that  $r^2 = 0.106 \times 100 = 10.6\%$  thus the effect of development spending on economic growth is 10.6%. From the results of this analysis, the hypothesis that there is a significant influence of the budget on economic growth in Indonesia in 2019 is rejected. The results of this study are not in line with research conducted by deviani (2016) which provides an explanation that regional spending has a significant effect on economic growth.

**Keywords:** Budget Allocation and Economic Growth

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pada umumnya pembangunan nasional di negara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran produk domestik bruto (PDRB) pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto untuk daerah, baik tingkat I maupun tingkat II. Scumpeter tahun 1961 (lihat Budiono, 1992:48) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dikaitkan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah suatu sumber kenaikan output.

Salah satu komponen yang mempengaruhi kenaikan output tersebut adalah pengeluaran pemerintah. Syafrizal (1997:27-38) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan).

Peran pemerintah dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi mulai di pandang sebagai suatu hal yang penting ketika mekanisme pasar sebagai motor pergerakan mengalami kegagalan. Mangkoesoebroto (1999:2) menyatakan dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu; 1) *peranan alokasi*, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi; 2) *peranan distribusi*, dan; 3) *peranan stabilisasi*. Pada kebanyakan negara berkembang pelaksanaan 3 peran pemerintah ini banyak menghadapi kendala dan permasalahan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama apabila dihadapkan pada masalah pembangunan daerah. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi regional tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu (BPS, 2008). Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa suatu daerah tersebut dapat dikatakan maju dan berkembang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2004).

Hasil beberapa penelitian mengenai pengaruh antara pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal menunjukkan hasil yang signifikan, namun menurut hasil penelitian Abdullah dan Halim (2006) menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang signifikan seperti yang diungkapkan Adi (2006); Harianto dan Adi (2007) namun berdasarkan penelitian Darwanto dan Yustikasari

(2007) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi juga memiliki hasil yang beragam, berdasarkan hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun berdasarkan penelitian Syahri (2010) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadikan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi masih sangat menarik untuk dilakukan.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi untuk memahami bagaimana pengaruh aktifitas sektor publik dalam pengelolaan anggaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian pengeluaran pemerintah khususnya anggaran belanja pembangunan agar dapat lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat luas sehingga mampu memacu terciptanya pertumbuhan ekonomi yang kondusif.

### **Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain melaksanakan hak-haknya, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada pihak publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Abdul Halim (2002:73) mengemukakan bahwa: “Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”.

Kemudian bahwa belanja daerah dalam bentuk belanja modal adalah belanja untuk investasi, berikut diterangkan sbb: “Menurut Sukirno (2006) dalam Sayekti Sundiyah

(2009; 482) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

### **Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi**

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan kementerian negara/lembaga/SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi; perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Penggunaan fungsi/sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga/SKPD.
2. Program; penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga/SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain: pendekatan dan metodologi pelaksanaan, yang menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawabnya.
3. Kegiatan; bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya. Sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
4. Sub kegiatan; bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih subkegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan

keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sub kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan sub kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/sub kegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

### **Klasifikasi Biaya Menurut Jenis Belanja**

Pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Khusus untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya adalah; klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja, yaitu:

- Belanja Operasi: terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- Belanja Modal: terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.
- Belanja Lain-lain/Tidak Terduga
- Transfer

Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri No 64 Tahun 2013, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. belanja pegawai;
2. belanja bunga;
3. belanja subsidi;
4. belanja hibah;
5. belanja bantuan sosial;
6. belanja bagi hasil;
7. bantuan keuangan; dan
8. belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. belanja pegawai;
2. belanja barang dan jasa; dan
3. belanja modal.

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi dapat juga dikatakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan 10 digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Angkaangka PDRB digunakan sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan



kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau dalam perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak.

### **Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Desentralisasi fiskal yang telah terwujud dalam bentuk keleluasaan Pemda dalam mengalokasikan dana desentralisasi semestinya mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah menjadi tugas/fungsi daerah. Diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya. Investasi yang dilaksanakan pemerintah melalui belanja modal berkontribusi pada perekonomian regional, setidaknya dalam dua tahap. Dalam jangka pendek melalui belanja material dan penyerapan tenaga kerja dan dalam jangka panjang melalui angka pengganda pada sektor swasta yang turut berperan dalam perekonomian.

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian serta permasalahan yang sudah dijelaskan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dapat menggunakan kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini terdapat variabel yaitu Anggaran belanja pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.



### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori, hasil peneliti terdahulu dan hubungan antar variabel yang telah diuraikan, maka hipotesis yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Terdapat Pengaruh signifikan anggaran belanja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional, metode yang menyatakan hubungan sebab akibat atau apakah ada pengaruh antara variable X dan Y.

### Definisi Operasional Variabel

#### 1. Anggaran Belanja pembangunan

Anggaran Belanja pembangunan inidasarkan merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan variable bebas(independen) atau X

#### 2. Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi adalah variabel terikat(dependen)atau Y.proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

### Rancangan Penelitian

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan desain korelasional dengan menggunakan statistik korelasi



### Teknik Pengambilan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di indonesia sebanyak 34 provinsi.



## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, maka penelitian ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiono 2013: 81). Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi itu sendiri sebanyak 34 provinsi

### **Teknik Analisis Data**

Analisis hasil penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Satnislaus S. Uyanto(2009:129) analisis regresi dapat digunakan Untuk melihat pengaruh variabel independen X dan variabel dependen Y digunakan rumus regresi linear. Sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Keterangan :

- Y: Variabel hasil belajar
- a : bilangan konstanta
- b : koefisien regresi anggaran belanja
- X: Variabel pertumbuhan Ekonomi

## **HASIL PENELITIAN**

### **Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji One sample Kolmogrov-smirnov dan p-p plot dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05.

Hipotesis uji normalitas:

H<sub>a</sub> : data berdistribusi normal

H<sub>0</sub> : data tidak berdistribusi normal

### **Uji Hipotesis**

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Koefisien regresi

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.950	.230		21.501	.000
X	2.291	.000	.326	1.950	.060

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas coefficients regresi diatas dapat dilihat persamaan regresinya  $Y=4,950+2,291X$  Nilai konstanta sebesar 4,950 artinya jika nilai  $X=0$  atau variabel anggaran belanja pembangunan tidak ada, maka nilai variabel pertumbuha ekonomi adalah sebesar 4,950. Koefisien regresi variabel anggaran belanja pembangunan 2,291 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 (satu) poin variabel anggaran belanja pembangunan, maka hal itu akan meningkatkan pertumbuha ekonomisebesar 2,291 kali.

#### a. Uji signifikan

Kriteria:

- Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuha ekonomi.
- Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuha ekonomi.

Berdasarkan tabel koefisien dapat dilihat nilai signifikan  $0,060 > 0,05$  dengan demikian tidak terdapat pengaruh yang signifikan anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuha ekonomi.

#### b. Koefisien determinan

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.326 <sup>a</sup>	.106	.078	1.08425

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel Model Summary diatas dapat dilihat  $r^2 = 0,106 \times 100 = 10,6\%$  dengan demikian pengaruh anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuha ekonomi sebesar 10,6%.

## PEMBAHASAN

Teori Adolf Wagner dalam Anna Yulianita (2008;12) yang menjadi Hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Adapun belanja daerah yang disebut dengan belanja rutin, menurut (Mangkoesobroto, 1994). mengemukakan bahwa: "Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.". kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Abdul Halim (2002:73) mengemukakan bahwa: "Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana". Kemudian bahwa belanja daerah dalam bentuk belanja modal adalah belanja untuk investasi, berikut diterangkan sbb "Menurut Sukirno (2006) dalam Sayekti Sundiyah (2009; 482) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat coefficients regresi persamaan regresinya  $Y=4,950+2,291X$  Nilai konstanta sebesar 4,950 artinya jika nilai  $X=0$  atau variabel anggaran belanja pembangunan tidak ada, maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,950. Koefisien regresi variabel anggaran belanja pembangunan 2,291 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 (satu) poin variabel anggaran belanja pembangunan, maka hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,291 kali.

Berdasarkan tabel koefisien dapat dilihat nilai signifikan  $0,060 > 0,05$  dengan demikian tidak terdapat pengaruh yang signifikan anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel Model Summary di atas dapat dilihat  $r^2 = 0,106 \times 100 = 10,6\%$  dengan demikian pengaruh anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 10,6%. Dari hasil analisis ini maka hipotesis Terdapat Pengaruh signifikan anggaran belanja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh deviani (2016) yang memberikan penjelasan bahwa belanja daerah berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara tidak signifikan anggaran belanja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019
2. Besar pengaruh anggaran belanja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019 sebesar 10,6%.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka dapat disarankan agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat hendaknya pemerintah dapat memberikan anggaran belanja pemerintah sebaik mungkin karena dari hasil penelitian ini anggaran belanja memiliki pengaruh sebesar 10,6% terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti jika semakin tinggi anggaran belanja untuk menopang perekonomian maka pertumbuhan perekonomian akan semakin tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf Wagner dalam Anna Yulianita 2008, Hukum Wagner, Fungsi –fungsi meningkatnya pengeluaran pemerintah
- Abdul Halim, 2002 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi pertama Jakarta: Selemba Empat
- Sugiono 2013. Metode Penelitian
- Sukirno, 2006. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Sukirno 2006 dalam Sayekti Sundiyah 2009. Kegiatan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- Syafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma LP3ES,3,27-398